

**DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
STUDI KASUS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2024**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA EKONOMI**

OLEH:

AULIA FIRDANINGSIH

NIM: 22108010089

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag

NIP. 19670518 199703 1 003

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1257/Un.02/DEB/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA STUDI KASUS PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AULIA FIRDANINGSIH
Nomor Induk Mahasiswa : 22108010089
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a8a2def22126

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a8f99262e6a7

Penguji I

Dr. Sunaryati, SE., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6a8e5f90c2e6c

Penguji II

Dhiyaul Aulia Zulni, M.E.
SIGNED



Valid ID: 6a910d5f9ecc0

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
SIGNED

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Aulia Firdaningsih

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

DI Yogyakarta

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aulia Firdaningsih

NIM : 22108010089

Judul Skripsi : Determinan Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2024

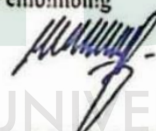
Skripsi ini telah layak untuk diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam.

Dengan ini, kami berharap skripsi ini dapat segera diujikan. Terima Kasih atas perhatian dan pertimbangannya.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 03 Agustus 2026

Pembimbing



Prof. Dr. H. Svaqiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Firdaningsih
NIM : 22108010089
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Determinan Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 - 2024”** merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 03 Agustus 2026

Penulis,



Aulia Firdaningsih

NIM 22108010089

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Firdaningsih
NIM : 22108010089
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Determinan Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2024"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Yogyakarta
Pada tanggal: 03 Agustus 2026



Aulia Firdaningsih

HALAMAN PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Firdaningsih
Tempat dan Tanggal Lahir : Depok, 14 Agustus 2003
NIM : 22108010089
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan penulisan berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 03 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Aulia Firdaningsih
NIM 22108010089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

“Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu, jadikan percikan tuk
menerpa tekadmu, jalan hidupmu hanya milikmu sendiri, rasakan
nikmatnya hidupmu hari ini.”

(Baskara Putra-Hindia)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam penyusunan skripsi ini, transliterasi kata bahasa Arab yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pedoman yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka and ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zāi	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es and ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

قَدَدٌ عَدَدٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَمٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbutah di Akhir Kata

1. Ditulis dengan *h* jika dibaca *Sukun*

قَدَمٌ ح	ditulis	<i>ḥikmah</i>
قَدَمٌ ز	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

قَدَمَةُ الْاَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā'marbutāh* hidup dengan *fathāh*, *kasrah*, or *dāmāh* dengan demikian dituliskan *ny t* or *h*.

زَقَاةٌ اَوْطَفَمٌ	Ditulis	<i>zakātā al-fitrāh</i>
--------------------	---------	-------------------------

D. Vokal Pendek

Setiap huruf *tā' marbutāh* ditransliterasikan ke dalam huruf 'h', baik ketika berada di akhir kata tunggal maupun saat berada di tengah rangkaian kata (misalnya ketika diikuti oleh kata sandang 'al-'). Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku untuk kata-kata serapan dari bahasa Arab yang telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya, kecuali apabila penulisan bentuk aslinya secara eksplisit memang dikehendaki.

-----	fatḥah	Ditulis	A
-----	kasrah	Ditulis	I
-----	ḍammah	Ditulis	U
فَ	fatḥah	Ditulis	fa'ala
كَ	kasrah	Ditulis	ẓukira
و	ḍammah	Ditulis	yazḥabu

E. Vokal Panjang

1	fatḥah + alif أَهْلَح	ditulis ditulis	Ā jāhiliyah
2	fatḥah + yā'mati سِنْتَ	ditulis ditulis	Ā tans ā
3	kasrah + yā'mati مَزَكَ	ditulis ditulis	i karim
4	ḍammah + wāwu mati لَمْوَض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	fatḥah + yā'mati مَلْسَمَك	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fatḥah + wāwu mati لَل	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

تَنَادَكَ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُتِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
وَلَّيْكَ مَمَّكَ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka bisa ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

اورملن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
اورلاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

اونداء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

اوشدا	ditulis	<i>al-Syams</i>
-------	---------	-----------------

I. Kata Sandang Alif + Lam

ذو او طموض	ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
تف او عنسح	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan terbaik bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Atas rahmat dan karunia Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Determinan Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2024”.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M.Si., Ak., ACPA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Sunaryati, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Anggari Marya Kresnowati, S.E., M.E., sebagai Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah
6. Bapak Prof. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas keikhlasan, kesabaran, bimbingan, dan ilmu yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Dr. Taosige Wau, S.E., M. Si., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat yang berharga selama proses perkuliahan.

8. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman selama proses perkuliahan.
9. Segenap pegawai Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bantuan administratif yang memudahkan proses akademik.
10. Kedua orang tua tercinta, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah penulis. Perhatian dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi menjadi anugerah terbesar yang menguatkan penulis dalam setiap proses hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga keberhasilan penulis menyandang gelar sarjana dapat menjadi salah satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi Mama dan Bapak atas setiap doa, pengorbanan, serta harapan yang selama ini dipanjatkan. Besar harapan penulis semoga kedua orang tua senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, dan keberkahan, sehingga penulis masih memiliki banyak kesempatan untuk terus membahagiakan serta mempersembahkan berbagai keberhasilan lainnya di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekaligus dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian di masa mendatang.

Yogyakarta, 03 Agustus 2026

Penulis,



(Aulia Firdaningsih)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN PERNYATAAN BERJILBAB.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Teori Kapabilitas Amartya Sen.....	15
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	17
3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	21
4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.....	22
5. Upah Minimum.....	24
6. Tingkat Kemiskinan.....	25
7. Kepadatan Penduduk	28
B. Kajian Pustaka	30
C. Kerangka Pemikiran.....	36
D. Pengembangan Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Populasi dan Sampel.....	43
C. Metode Pengumpulan Data	44
D. Definisi Operasional Variabel.....	45
E. Metode Analisis Data Penelitian.....	51
F. Metode Pemilihan Model.....	56
G. Pengujian Asumsi Klasik.....	58
H. Pengujian Parameter Model	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	65
B. Analisis Deskriptif	67
C. Analisis Hasil Uji.....	71

D. Pembahasan.....	87
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Keterbatasan Penelitian.....	103
C. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	132



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2015-2024	2
Gambar 1. 2 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2015-2024.....	6
Gambar 1. 3 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)	8
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	65
Gambar 4. 2 Output Uji Heteroskedastisitas.....	77
Gambar 4. 3 Output Uji Normalitas.....	78
Gambar 4. 4 Uji Heteroskedastisitas dengan Cross-Section Weight	81
Gambar 4. 5 Uji Normalitas dengan Cross-Section Weight	82
Gambar 4. 6 Rata-rata Lamanya Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024..	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Pustaka.....	30
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Deskriptif.....	67
Tabel 4. 2 Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel	72
Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow.....	73
Tabel 4. 4 Hasil Uji Hausman.....	74
Tabel 4. 5 Output Uji Multikolinearitas.....	76
Tabel 4. 6 Hasil Estimasi dengan Cross-Section	80



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2015-2024. Variabel yang digunakan meliputi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, tingkat kemiskinan, upah minimum, dan kepadatan penduduk. Data yang digunakan merupakan data panel dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2015-2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM. Sementara itu, tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pengupahan, serta pengelolaan kepadatan penduduk yang efektif merupakan faktor penting dalam meningkatkan pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, peningkatan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan perlu diiringi dengan efektivitas penggunaan anggaran serta pemerataan akses layanan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap peningkatan IPM.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, tingkat kemiskinan, upah minimum, kepadatan penduduk, data panel.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors affecting the Human Development Index (HDI) in East Nusa Tenggara Province during the period 2015-2024. The variables used include government expenditure on education, government expenditure on health, poverty rate, minimum wage, and population density. The data used are panel data from 22 regencies/cities in East Nusa Tenggara Province during the period 2015-2024. The analytical method employed is panel data regression using the Fixed Effect Model (FEM). The results indicate that government expenditure on education and government expenditure on health have a positive but insignificant effect on HDI. Meanwhile, poverty rate and population density have a negative and significant effect on HDI, while minimum wage has a positive and significant effect on HDI. These findings suggest that reducing poverty, improving community welfare through wage policies, and managing population density effectively are important factors in enhancing human development in East Nusa Tenggara Province. On the other hand, increases in education and health expenditures need to be accompanied by effective budget utilization and equitable access to public services in order to contribute more optimally to improvements in HDI.

Keywords: Human Development Index (HDI), government expenditure on education, government expenditure on health, poverty rate, minimum wage, population density, panel data.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

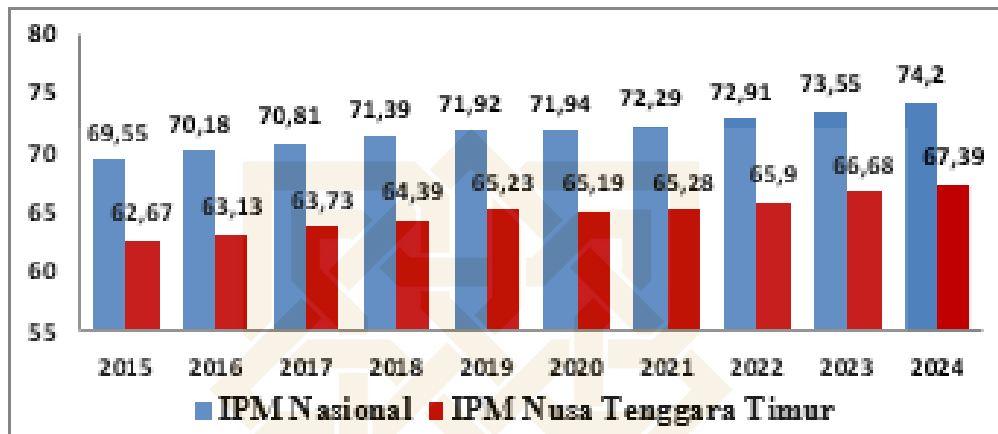
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP, 1990), pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan dan kesempatan yang dimiliki masyarakat, sehingga setiap individu dapat memperoleh kehidupan yang sehat, pendidikan yang memadai, serta standar hidup yang layak. Konsep tersebut sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menempatkan kesejahteraan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan pembangunan (UNDP, 2022). Dengan demikian, keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat dilihat salah satunya melalui capaian pembangunan manusianya, yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator yang menggambarkan tingkat kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah.

Di Indonesia, nilai IPM menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, terutama di kawasan Indonesia bagian timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang masih menghadapi kondisi tersebut. Perbandingan capaian IPM antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan

capaian IPM nasional selama periode 2015-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Perkembangan IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2015-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan grafik di atas, IPM nasional mengalami peningkatan dari 69,55 pada tahun 2015 menjadi 74,20 pada tahun 2024. Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengalami peningkatan IPM dari 62,67 pada tahun 2015 menjadi 67,39 pada periode yang sama. Meskipun demikian, capaian IPM Provinsi NTT masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kualitas pembangunan manusia di Provinsi NTT masih tergolong tertinggal, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Pemerataan pembangunan antar wilayah menjadi prioritas utama pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan

pembangunan antara wilayah Indonesia bagian timur dan barat Indonesia (Bappenas, 2019). Upaya tersebut penting karena Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih menghadapi berbagai tantangan dalam bidang pembangunan, seperti keteringgalan dalam pembangunan, keterbatasan akses antar daerah, minimnya infrastruktur, serta tingkat kemiskinan yang masih tinggi (Dachlan & Suhab, 2014). Sebagai salah satu provinsi di wilayah timur Indonesia, Provinsi NTT masih menghadapi tantangan tersebut sehingga peningkatan kualitas pembangunan manusia perlu menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan daerah.

Peningkatan kualitas pembangunan manusia sangat tergantung pada peran pemerintah yang memberikan dana cukup untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Prioritas utama pengeluaran pemerintah adalah meningkatkan serta menjaga kesejahteraan masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengembangkan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur umum dan sosial, layanan publik, serta program jaminan sosial (Firmansyah & Wasil, 2024). Dengan adanya investasi di kedua sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak hanya berdampak pada IPM, tetapi juga membantu menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan (Mahendra, 2020).

Peningkatan anggaran sektor pendidikan berperan dalam memperbaiki kualitas pembelajaran melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, peningkatan akses, serta penguatan kompetensi pendidik, yang pada akhirnya mendorong peningkatan capaian pendidikan sebagai komponen utama IPM

(Villela & Paredes, 2022). Selain itu, peningkatan anggaran kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui perluasan akses pelayanan kesehatan, terutama pada daerah dengan keterbatasan fasilitas publik (Simamora et al. 2025).

Pemerintah daerah terus meningkatkan pengeluaran pada sektor pendidikan dan kesehatan selama periode 2015-2024, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan pengeluaran tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh capaian IPM yang mampu melebihi rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi NTT tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran pemerintah, tetapi juga tergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat yang berbeda di setiap wilayah.

Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antarwilayah juga tercermin dari variasi tingkat pendapatan masyarakat. Wilayah dengan aktivitas ekonomi yang lebih berkembang umumnya memiliki tingkat upah yang lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan aktivitas ekonomi yang relatif rendah. Upah minimum merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya. Upah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena semakin besar upah yang diterima, semakin tinggi tingkat kesejahteraan hidup masyarakat tersebut (Soemali, 2022).

Kondisi tersebut juga tercermin pada perbedaan tingkat upah antarwilayah di Provinsi NTT. Besaran upah minimum Kabupaten/Kota

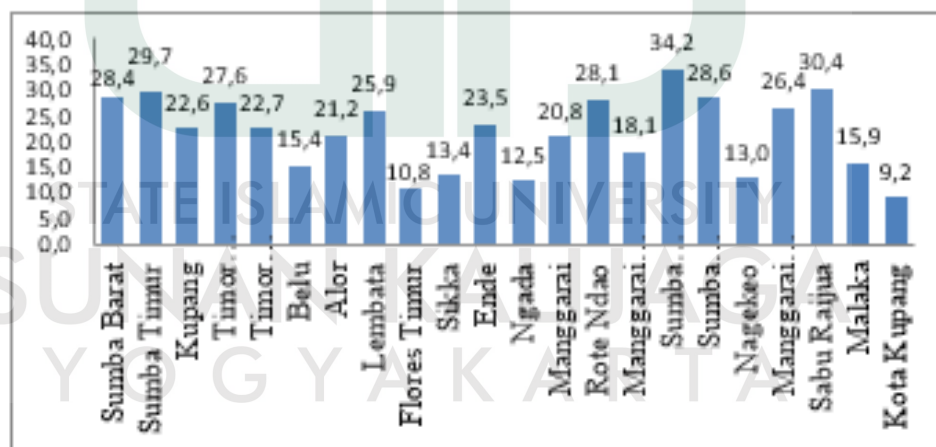
(UMK) pada tahun 2024 relatif sama pada sebagian besar kabupaten, yaitu sebesar Rp2.186.826, sedangkan Kota Kupang memiliki UMK yang lebih tinggi, yakni sebesar Rp2.250.419. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja formal dengan tingkat pendapatan yang lebih baik masih terkonsentrasi di Kota Kupang.

Kenaikan upah minimum dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat karena meningkatkan kemampuan daya beli serta membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup secara layak, sehingga dapat mendorong peningkatan pembangunan manusia (Faizin, 2021). Sejalan dengan hal itu, meningkatnya penghasilan masyarakat dapat mendorong perubahan cara belanja menuju pemenuhan kebutuhan yang lebih baik, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat (Arimawan & Suwendra, 2022). Kondisi ekonomi yang semakin membaik juga memberi kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dan layanan dasar. Pemenuhan kebutuhan tersebut akhirnya membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang terlihat dari peningkatan IPM.

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang berkaitan erat dengan pembangunan manusia. Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dapat menghambat akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja yang layak sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat (Hidayat & Woyanti, 2021). Provinsi NTT termasuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pada periode 2017-2023, NTT berada pada peringkat ketiga provinsi dengan tingkat kemiskinan

tertinggi di Indonesia. Tingginya tingkat kemiskinan di NTT berkaitan dengan karakteristik wilayah yang terdiri atas banyak pulau, memiliki topografi yang beragam, akses antarwilayah yang relatif sulit, serta keterbatasan infrastruktur (Ledhe, 2024; Rahmadhanti & Aminda, 2025).

Permasalahan kemiskinan di NTT juga ditandai oleh adanya perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayah. Perbedaan karakteristik sosial ekonomi dan geografis antarkabupaten/kota menyebabkan tingkat kemiskinan tidak tersebar secara merata. Beberapa wilayah memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sehingga upaya pengentasan kemiskinan perlu memperhatikan karakteristik dan kondisi masing-masing wilayah. Penelitian mengenai kemiskinan di NTT menunjukkan bahwa faktor faktor ekonomi dan demografi turut berkaitan dengan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut (Rahmadhanti & Aminda, 2025).



Gambar 1. 2 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2015-2024

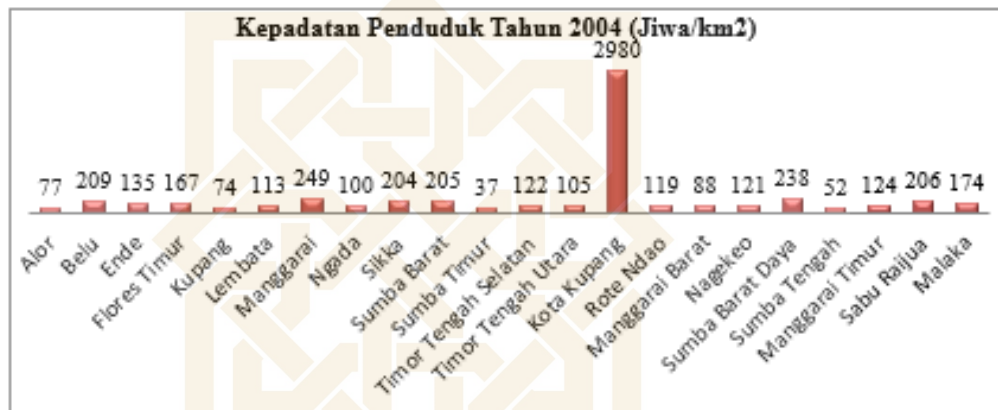
Sumber : Badan Pusat Statistik

Kondisi tersebut tercermin pada tingkat kemiskinan di berbagai wilayah Provinsi NTT. Berdasarkan gambar di atas, sebagian besar kabupaten di wilayah tersebut masih memiliki persentase penduduk miskin yang relatif tinggi, bahkan beberapa daerah memiliki angka kemiskinan di atas 30. Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Sabu Raijua merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, sedangkan Kota Kupang memiliki tingkat kemiskinan terendah. Perbedaan tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah di Provinsi NTT masih belum merata.

Tingkat kemiskinan yang tinggi tidak hanya mencerminkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi hambatan bagi proses pembangunan daerah. Keterbatasan kondisi ekonomi dapat mengurangi produktivitas masyarakat serta membatasi kemampuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, kemiskinan dapat memperbesar ketimpangan dan memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan (Todaro, 2011). Pengentasan kemiskinan perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan karena memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Amalia et al. 2021).

Karakteristik demografis turut menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan pembangunan manusia di suatu daerah. Provinsi NTT sebagai wilayah kepulauan memiliki persebaran penduduk yang berbeda antarwilayah sehingga

dapat menimbulkan perbedaan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar dan perkembangan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut menjadikan kepadatan penduduk sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Provinsi NTT.



Gambar 1. 3 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan grafik di atas, kepadatan penduduk antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Kota Kupang memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 2.980 jiwa/km² pada tahun 2024, sedangkan sebagian besar kabupaten lainnya berada jauh di bawah angka tersebut. Adapun kabupaten dengan kepadatan penduduk relatif rendah antara lain Sumba Timur sebesar 37 jiwa/km² dan Sumba Tengah sebesar 52 jiwa/km². Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi dan ketersediaan layanan publik belum tersebar secara merata antarwilayah.

Ketimpangan persebaran penduduk dapat berpengaruh terhadap ketersediaan sarana yang mendukung pembangunan manusia. Wilayah dengan

tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi umumnya didukung oleh fasilitas dan kegiatan ekonomi yang lebih berkembang (Herinoto et al. 2021). Kondisi jumlah dan persebaran penduduk juga berkaitan dengan pemerataan infrastruktur pembangunan sumber daya manusia. Wilayah yang memiliki konsentrasi penduduk lebih besar umumnya lebih mudah dalam memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja (Antara & Suryana, 2020). Keberadaan berbagai fasilitas tersebut dapat mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi IPM menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Nurvita et al. (2022) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan Ferdiansyah dan Febrianti (2025) menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan, sementara pengeluaran pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh faktor-faktor pembangunan manusia dapat berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Penelitian mengenai IPM di Provinsi NTT telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus variabel yang berbeda. Penelitian Banase dan Purwono (2024) dan Dhae et al. (2025) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM, sedangkan Rosyadah (2021) menganalisis pengaruh kepadatan penduduk, angka partisipasi murni, upah

minimum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM. Penelitian-penelitian tersebut belum menggabungkan faktor fiskal, ekonomi, kemiskinan, dan demografi dalam satu model penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, upah minimum, tingkat kemiskinan, dan kepadatan penduduk secara bersama-sama terhadap IPM di Provinsi NTT.

Pemilihan Provinsi NTT sebagai wilayah penelitian didasarkan pada masih rendahnya capaian pembangunan manusia dibandingkan rata-rata nasional dan tingginya tingkat kemiskinan yang dihadapi masyarakat. Perbedaan kondisi sosial ekonomi dan demografis antarkabupaten/kota juga menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut. Karakteristik Provinsi NTT sebagai wilayah kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam turut memengaruhi pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan layanan dasar. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi NTT penting untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini menggunakan lima variabel yang meliputi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, upah minimum, tingkat kemiskinan, dan kepadatan penduduk untuk menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan IPM pada 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode

2015-2024. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan manusia yang lebih efektif dan tepat sasaran. Maka dari itu, penelitian ini berjudul “Determinan Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2024”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini tertuju pada lima rumusan masalah yang dijabarkan dalam bentuk pertanyaan, di antaranya:

1. Apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
4. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
5. Apakah kepadatan penduduk berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Menganalisis pengaruh kepadatan penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti: Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi IPM, terutama peran dari pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, upah minimum, tingkat kemiskinan, dan kepadatan penduduk.
2. Bagi akademisi: Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber tambahan dan memperkaya buku-buku ilmiah di bidang pembangunan manusia, ekonomi daerah, dan kebijakan publik, serta berkontribusi dalam studi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.
3. Bagi pemerintah: Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan manusia,

terutama dalam mengelola anggaran pendidikan dan kesehatan, menentukan upah minimum, mengatasi kemiskinan, serta memperatakan pembangunan di berbagai wilayah, sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada awal bab ini menyajikan gambaran umum penelitian dengan menjelaskan permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian, termasuk latar belakang masalah yang didukung oleh fenomena empiris dan data terkait, rumusan masalah yang menegaskan arah penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran untuk alasan penelitian dilakukan serta arah pembahasan secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori serta konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian, hasil penelitian terdahulu sebagai referensi empiris, kerangka teoretik, dan pengembangan hipotesis yang menjadi dasar teori penelitian untuk menganalisis hubungan antar variabel serta memperkuat argumen dan analisis dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis penelitian, objek dan lokasi penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, sumber serta teknik pengumpulan data, serta metode analisis termasuk pengujian hipotesis sebagai langkah-

langkah sistematis yang ditempuh peneliti dalam memperoleh dan mengolah data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data serta pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah penelitian, meliputi gambaran umum objek penelitian, analisis deskriptif, hasil pengujian hipotesis, serta interpretasi temuan yang dihubungkan dengan teori dan studi sebelumnya untuk menjelaskan makna empiris dari hasil yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang mengaitkan temuan penting dari penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bagian ini mencakup keterbatasan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya maupun pihak terkait sebagai penutup serta arahan untuk penelitian di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, tingkat kemiskinan, upah minimum, dan kepadatan penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama periode 2015-2024 dengan menggunakan analisis regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2015-2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan belum mampu memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan IPM. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa besarnya anggaran pendidikan belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas penggunaan anggaran, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan antarwilayah sehingga manfaatnya terhadap pembangunan manusia belum dapat dirasakan secara optimal.
2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2015-2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan belum mampu memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penggunaan anggaran,

pemerataan fasilitas kesehatan, serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih menjadi kendala sehingga peningkatan belanja kesehatan belum sepenuhnya mampu meningkatkan IPM.

3. Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2015-2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan daya beli. Pendapatan yang lebih tinggi memberikan kemampuan yang lebih besar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia.
4. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2015-2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan akan menurunkan kualitas pembangunan manusia karena masyarakat memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Temuan ini memperkuat bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang memadai berpotensi menurunkan kualitas

pembangunan manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang besar belum tentu menjadi modal pembangunan apabila tidak didukung dengan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas layanan dasar, serta pengelolaan kependudukan yang lebih efektif agar pertumbuhan penduduk dapat menjadi potensi yang mendukung pembangunan manusia.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari adanya beberapa batasan yang memengaruhi ruang lingkup serta kedalaman analisis. keterbatasan ini diharapkan dapat diperhatikan dalam studi-studi yang akan datang untuk menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Berikut adalah batasan-batasan penelitian ini:

1. Penelitian Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen, yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, tingkat kemiskinan, upah minimum, dan kepadatan penduduk. Sementara itu, masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, kualitas infrastruktur, investasi daerah, serta akses terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, model penelitian ini belum mampu menjelaskan seluruh faktor yang memengaruhi IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 2015-2024 sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi pada periode tersebut. Model yang digunakan juga belum sepenuhnya mampu menangkap pengaruh berbagai faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian nasional, dinamika pasar tenaga kerja, maupun dampak pandemi COVID-19 yang dapat memengaruhi pembangunan manusia pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, upah minimum, tingkat kemiskinan, dan kepadatan penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2015-2024, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, disarankan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan perlu terus diperkuat melalui peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga perlu memperhatikan pemerataan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik agar tingginya kepadatan penduduk pada wilayah tertentu tidak menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia.

2. Bagi perencana kebijakan pembangunan daerah, diperlukan perencanaan pembangunan yang lebih terpadu dan berbasis data guna mengurangi kesenjangan IPM antar kabupaten/kota. Integrasi program pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas ketenagakerjaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran. Di samping itu, aspek kepadatan penduduk perlu menjadi pertimbangan dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kesempatan kerja sehingga peningkatan jumlah penduduk tidak menjadi hambatan bagi pembangunan manusia.
3. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan partisipasi dalam pendidikan, memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, serta meningkatkan keterampilan dan produktivitas kerja agar mampu memperoleh pendapatan yang lebih baik. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan ekonomi, masyarakat dapat berkontribusi secara lebih optimal dalam mendukung pembangunan manusia di daerahnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, kualitas infrastruktur, investasi daerah, dan akses pelayanan publik. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang maupun

metode analisis yang berbeda agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan manusia secara lebih mendalam



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F., Sinaga, R., Asyari, Silitonga, R. F. S. D., Solikin, A., Siregar, A. K., Tua, H. R., Maulina, D., Kusumaningrum, R., Sahamony, N. F., Litriani, E., & Ladjin, N. (2021). Tahapan Pembangunan Ekonomi. In *Ekonomi Pembangunan* (pp. 151–161). Widina Bhakti Persada.
- Antara, I. G. M. Y., & Suryana, I. G. P. E. (2020). Analisis Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *Media Komunikasi Geografi*, 21(1), 63–73. <https://doi.org/10.23887/mkg.v21i1.22958>
- Aprilianti, R., Messakh, G. C., Asiah, S. N., & Nohe, D. A. (2022). Analisis Regresi Data Panel pada Faktor yang Memengaruhi Persentase Kemiskinan di Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*.
- Apriska, L., Irwan, M., Suprpti, I. A. P., & Anggara, J. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB). 10(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jseh.v10i1.451>
- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Tapal Kuda. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 313–326. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.08>
- Aulia, G. R. N., Daeng, A., & Fatimah, S. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Pendapatan Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Mataram Tahun 2012–2021. *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v2i2.548>
- Avigna, I. K. M., Apriadi, A. M., & Princess. (2022). Analysis of the Effect of HDI, GRDP, and Minimum Wages on Poverty in Central Java for the Period of 2011-2020. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(1), 157–166. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i1.13564>
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024*.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
<https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/3/TXpoNlpEWjNWWGczYnpSdFVVVnRSa1pPWlVwWmR6MDkjMw==/jumlah-desasup-1--sup--kelurahan-yang-memiliki-sarana-kesehatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-timur--2024.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Rencana Strategis Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://bpmptt.kemendikdasmen.go.id/wp-content/uploads/2025/10/Renstra-2025-2029_15102025.pdf
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Indikator Kemiskinan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir. <https://oganilirkab.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir. (2022). *Indikator Kemiskinan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (3rd ed.). John Wiley & Sons Ltd.
- Banase, M. A. D. D., & Purwono, R. (2024). The Influence of Government Expenditure on the Human Development Index in NTT Province. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 9(1), 109–119. <https://doi.org/10.20473/jiet.v9i1.57397>
- Bappenas. (2019). *Konreg Wilayah Nusa Tenggara: Pembangunan Nusa Tenggara 2020-2024 Difokuskan pada Penguatan Wisata Lombok dan Labuan Bajo*. Kementerian PPN/Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/konreg-wilayah-nusa-tenggara-pembangunan-nusa-tenggara-2020-2024-difokuskan-pada-penguatan-wisata-lombok-dan-labuan-bajo>
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan EViews)* (Pertama).
- BPS. (2017). *Indeks pembangunan manusia (ipm)* (S. N. W. dan A. Statistik (ed.)). Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. <https://doi.org/4102002.7303>
- BPS. (2021). *INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Dachlan, D., & Suhab, S. (2014). Pembangunan Kawasan Timur Indonesia: Dalam Konteks Kekinian Indonesia. *Puslitbang Kebijakan Dan Manajemen LPPM Universitas Hasanuddin*.
- Damayanti, A. P., & Suryaningrum, D. H. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021). *Jurnal Maneksi: Management Ekonomi Dan Akutansi*, 12(3).

<https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1733>

- Dhae, F. P., Renggo, Y. R., & Hudang, A. K. (2025). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Transformatif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 14(1). <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v2i2.548>
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024*. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. <https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/1Y8GvViCHf0UxGuqK0o6fXxWmumUxzC95VWpEJbl.pdf>
- Djirimu, M. A., Tombolotutu, A. D., & Sading, Y. (2020). Produktivitas Tenaga Kerja dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 4(3), 195–218. <https://doi.org/10.31685/kek.v4i3.665>
- Faizin, M. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 21–227. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3027>
- Febrianto, M., & Astrid Maria Esther. (2023). Pengaruh Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 281–2850. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17787>
- Ferdiansyah, A. B., & Febrianti, G. R. (2025). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur 2017-2024. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 9(1), 18–39. <https://doi.org/10.31092/jmkip.v9i1.3315>
- Firmansyah, A. H., & Wasil, M. (2024). Pengaruh Belanja Pemerintah dan PDRB Terhadap Peningkatan IPM di Indonesia Timur. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 5(1), 54–65.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics* (Fourth). Gary Burke.
- Harlina, G. (2024). Analisis Pengaruh Pendidikan , Kesehatan Masyarakat, dan Pendapatan per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumbawa Barat. *GLORY: Global Leadership Organizational Research in Management*, 2(1), 66–77. <https://doi.org/10.59841/glory.v2i1.761>
- Herinoto, R, M. R., & Zulfanetti. (2021). Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia dan Hubungannya dengan Belanja Infrastruktur serta Pertumbuhan

- Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 343–358. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v16i2.12400>
- Hidayat, S., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan, Kemiskinan, Dan Teknologi Terhadap Ipm Di Indonesia. *JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 23(4), 122–137.
- Hidayati, D. R., & Imaningsih, N. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(4), 703–710. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i4.11875>
- Ibrahim, A. (2021). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam* (A. Rahmati (ed.)). Ar-Raniry Press.
- Indiati, P. S. T., Asmara, K., & Nisa, F. L. (2025). Analisis Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 120–133. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3247>
- Irham, A. R., & Putri, R. M. (2023). Kepadatan Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. *MKG: Media Komunikasi Geografi*, 24(1), 91–100. <https://doi.org/10.23887/mkg.v24i1.60261>
- Karyono, Y., Tusianti, E., Gunawan, I. G. N. A. R., Nugroho, A., & Clarissa, A. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2020* (A. Said & W. Winardi (eds.)). Badan Pusat Statistik.
- Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. In W. C. Kristiaji (Ed.), *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga.
- Kurnianingsih, T. (2013). *Dimensi Kemiskinan*. Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/apbn_Dimensi_Kemiskinan20130130135844.pdf
- Ledhe, L. Y. (2024). Analisis Kemiskinan Multidimensi di Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. *BPS Provinsi NTT: JURNAL STATISTIKA TERAPAN*, 4(1), 40–57. <https://doi.org/10.64930/jstar.v4i1.57>
- Madany, N., Ruliana, & Rais, Z. (2022). Regresi Data Panel dan Aplikasinya dalam Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Idx Lq45 Bursa Efek Indonesia. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 4(2), 79–94. <https://doi.org/10.35580/variansiunm28>
- Mahendra, A. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan, Inflasi dan Kemiskinan Terhadap Indeks

- Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating di Indonesia. *JMB: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 20(September), 174–186.
- Mahya, A. J., & Widowati. (2021). Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Prismatika: Jurnal Pendidikan Dan Riset Matematika*, 3(2), 126–138. <http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/prismatika>
- Maulinaa, U., & Andriyani, D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Tpk Terhadap IPM di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, XI(April), 28–37. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i1.3171>
- Missa, L. E. (2025). *Ombudsman NTT Tegaskan Hak Kompensasi JKN, Ungkap Temuan Kekosongan Obat dan Layanan Laboratorium*. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-ntt-tegaskan-hak-kompensasi-jkn-ungkap-temuan-kekosongan-obat-dan-layanan-laboratorium>
- Nandita, D. A., Alamsyah, L. B., Jati, E. P., & Widodo, E. (2019). Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1), 42–52. <https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.28950>
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harlan, H., Siregar, R. T. M., & Rio, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis: Teknik dan Analisis Data dengan SPSS, STATA, dan EViews* (1st ed.). Madenatera. <https://id.scribd.com/archive/plans?doc=726261507>
- Nurvita, D., Rohima, S., Bashir, A., & Mardalena, M. (2022). The Role of Public Spending on Education , Health , and Economic Growth toward Human Development Index in the Local Economy. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 6(June). <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v6i2.197-210>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Ombudsman Beberkan Sulitnya Akses Pendidikan di NTT*. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-beberkan-sulitnya-akses-pendidikan-di-ntt>
- Pake, S. D. S., Kawung, G. M. V., & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(02), 13–22. <https://doi.org/10.54367/jmb.v20i2.1010>

- Petatematikindo. (2013). *Peta Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- Pratama, A., & Ariza, A. (2024). Dampak Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sekadau. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 1338–1350. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i5.3769>.
- Pratama, C. L., & Mandai, S. (2023). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 241–248. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15352>
- Pratama, M. I., & Nursari, A. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung : Belanja Pendidikan , Belanja Kesehatan , Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto. *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(1), 34–48. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1782>
- Prisie, M. Y. N. (2025). *Kemenkes prioritaskan NTT dalam reformasi layanan kesehatan*. <https://www.antaraneews.com/berita/4881137/kemenkes-prioritaskan-ntt-dalam-reformasi-layanan-kesehatan>
- Purba, B., Anindya, D. A., Abdullah, S., Handiman, U. T., Zulham, T., Mahulae, D. Y. D., Muliana, Yavishan, Pandarangga, A. P., Fajrillah, & Tamrin, M. (2024). *Ekonomi Publik: Teori dan Penerapan Kebijakan Fiskal*. Yayasan Kita Menulis. <file:///mnt/data/FullBook-Ekonomi-Publik-Teori-dan-Penerapan-Kebijakan-Fiskal.pdf>
- Putri, O. E., Astuty, S., & Kamaruddin, C. A. (2024). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. *IME: Inovasi Makro Ekonomi*, 6(4), 1–10. <https://journalversa.com/s/index.php/ime>
- Rahmadhanti, F., & Aminda, R. S. (2025). ANALISIS KAUSALITAS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. 4(1), 65–76. <https://doi.org/10.59664/jded.v4i1.10413>
- Ratnasari, R. E., & Masdjojo, G. N. (2025). Pengaruh Kepadatan Penduduk, Inflasi, Belanja Modal, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. *Journal of Economics and Management Sciences*, 7(4), 635–643. <https://doi.org/10.37034/jems.v7i4.201>
- Rosyadah, J. A. (2021). Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 4(1), 1080–1092. <https://doi.org/10.15294/efficient.v4i1.41076>
- Satyahadewi, N., Aprizkyandari, S., & Oprasianti, R. (2023). Regresi Data Panel dalam Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM di Kalimantan Barat.

Statistika: Jurnal Ilmiah Teori Dan Aplikasi Statistika, 23(2), 123–131.
<https://doi.org/10.29313/statistika.v23i2.2201>

Simamora, S., Nurjannah, & Iskandar. (2025). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 9(2), 16–28. <https://doi.org/10.33059/jse.v9i2.11802>

Simarmata, Y. W., & Deden Dinar Iskandar. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Penduduk, Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan IPM: Analisa Two Stage Least Square Untuk Kasus Indonesia. *JDEP: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 78–94. <https://doi.org/10.14710/jdep.5.1.78-94>

Statistik, B. P. (2024). *Kepadatan Penduduk*. Badan Pusat Statistik (BPS). <https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/59801>

Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19 ed.). Alfabeta.

Suparmoko, M. (2009). *Pengantar Ekonomika Makro* (Edisi 4). BPFE-Yogyakarta.

Todaro, M. P. (2011). Pembangunan Ekonomi. In S. C. Smith & M. P. dan S. Todaro Stephen C. (Eds.), *Economic Development* (Edisi 11, Vol. 1). Erlangga. Alih bahasa dari Economic Development 11th Edition oleh Agus Dharma

UNDP. (2022). *2022 Annual Report*. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/>

UNDP, & Programme, U. N. D. (1990). *Human Development Report 1990*. Oxford University Press. <file:///mnt/data/hdr1990encompletenostats.pdf>

Villela, R., & Jacobo Paredes, J. (2022). *Empirical Analysis on Public Expenditure for Education , Human Capital and Economic Growth : Evidence*.

World Health Organization. (2010). *Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of indicators and their measurement strategies*. World Health Organization. <https://iris.who.int/items/ecbd9a5a-538f-43a7-8050-d18073d51bd4>